

BULETIN FAKTA EKOLOGI
EDISI BULAN AGUSTUS 2025

FAKTA EKOLOGI

PULIHKAN!
SULSEL
WALHI

**JEJAK TANAH
DAN LAUT YANG
DIREBUT, HARAPAN PADA
ALAM YANG DIRAWAT.**

WALHI
SULAWESI SELATAN

FAKTA
EKOLOGI



Buletin Fakta Ekologi merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial 'Fakta Ekologi' yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan rubrik yang terdiri dari empat bagian. Pertama, ada rubrik yang kami beri nama **Alarm SulSel** (berisi tentang infografis kondisi lingkungan hidup), Kedua ada **Fakta Ekologi** (laporan riset yang disajikan dalam bentuk tulisan atau Foto Esai), Ketiga ada **Cerita Kampung** (memuat cerita dan fakta dari akar rumput), dan terakhir yakni rubrik **Info WALHI SulSel** (berisi tentang informasi mengenai aktivitas WALHI Sulawesi Selatan). Selanjutnya, pada edisi agustus kali ini tim fakta ekologi mengangkat isu dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional dengan judul **Jejak Tanah dan Laut yang Direbut, Harapan pada Alam yang Dirawat**.

Tim Kerja Buletin Fakta Ekologi

Pimpinan Redaksi

Fadila Abdullah

Tim Penulis

Alisa Fitri, Archilleus Saile, Muhammad Ilham Septian, Verlyn Thesman, Claudia Aprilia Nuriman, Sri Suci Aulia Syarif, Jellian Malisa Evikayati Djonga Tari, Grisela Jesselyn Halim, Satria, Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSA, UKM Sintalaras UNM, dan LPA HPPMI Maros.

Desain dan Tata Letak

Fitrah Yusri

Editor

Slamet Riadi



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Praktik Monopoli Tanah yang Tak Pernah Usai

Ditulis oleh: Alisa Fitri

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Merupakan bunyi dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seyogyanya menjadi pedoman negara dalam mengelola segala sumber daya di Indonesia, yang dalam hal ini utamanya adalah pengelolaan tanah. Pengaturan tentang tanah sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) yang melalui



ALARI



penetapannya telah mengatur sumber-sumber agraria dalam hal penguasaan maupun pemanfaatan.

UUPA 1960 dalam prinsipnya mengisyaratkan bahwa tanah mestinya dipandang sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial dan bukan alat untuk mengeksploitasi (D. Bachriadi dan G. Wiradi, 2011). Negara sebagai pemegang mandat, berkewajiban dalam mengatur dan memastikan praktik agraria di negara ini tetap sejalan dengan tujuan awalnya, yakni keadilan sosial.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, kemunculan peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan UUPA 1960 melahirkan hak-hak khusus atas tanah yang di antaranya adalah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan, Hak Penguasaan Hutan, dan lain-lain. Hak-hak khusus tersebut kemudian memberi kesempatan untuk praktik monopoli tanah dan konflik-konflik agraria terus tumbuh yang kemudian menjadi kemunafikan terhadap Pasal 33 ayat (3) konstitusi negara Indonesia sebagai hukum tertinggi.

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), telah tercatat sebanyak 295 konflik agraria terjadi pada tahun 2024 yang menunjukkan lonjakan sebesar 21% dari tahun 2023. Salah satu konflik agraria yang telah bertahan puluhan tahun di negara ini adalah sengketa lahan antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan warga Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan. Warga Polongbangkeng-Takalar telah berjuang menuntut pengembalian hak atas tanahnya yang sejak tahun 1942 telah dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian juga membangun

pemukiman dari penguasaan PTPN XIV yang berdasar pada HGU.

Melihat pada sejarahnya, sebelum mengalami konflik dengan PTPN XIV, warga telah lebih dahulu berhadapan dan melakukan penolakan terhadap PT. Madu Baru yang dibantu oleh pemerintah juga beberapa personil ABRI pada 1978 yang memaksa warga agar bersedia menyerahkan tanahnya untuk pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu. Dengan diimangi ganti rugi sebesar Rp 10 (Sepuluh rupiah) yang ditentukan secara sepihak tanpa kesepakatan, warga dipaksa menyetujui pembangunan tersebut hingga dilangsungkannya pembebasan lahan pada akhir tahun 1978. Warga terus melakukan berbagai upaya untuk menuntut keadilan hingga pada akhirnya PT. Madu Baru memutuskan untuk mundur pada 1980 dan digantikan oleh PTPN XIV.

Dengan penetapan yang lagi-lagi secara sepihak, warga terpaksa menerima ganti rugi sebesar Rp 30 (Tiga puluh rupiah) dan pembebasan lahan kemudian dilakukan kembali pada 1982. Meskipun pembebasan lahan telah dilakukan sejak tahun 1982, namun HGU PTPN XIV baru terbit pada tahun 1994 dan 1998 yang telah berakhir pada 2023 dan 2024.

“Dulu waktu pembebasan, masyarakat dipaksa menerima ganti rugi walaupun sebenarnya tidak mau, ...kalau kita tidak mau terima ganti rugi, kita dianggap pengkhianat,” ungkap Abdul Hamid yang kerap disapa Dg. Mone.

Setelah kehilangan lahan, masyarakat yang sebelumnya bergantung dari kegiatan bertani untuk hidup artinya juga kehilangan pekerjaan pasti. Demi menghidupi keluarga, sebagian dari mereka berjuang mencari pekerjaan di luar daerah dan menjadi buruh rendahan. Ada pula yang bertahan di desa dengan menjadi buruh perkebunan dengan upah rendah, atau tetap bertani dengan lahan sempit.

“Banyak yang lari ke sana-kemari, atau keluar ke daerah lain untuk cari nafkah. Itu juga dikerja sisa-sisa lahan yang tidak diambil,” lanjut Dg. Mone.

Warga telah melalui banyak upaya dalam menuntut ketidakadilan yang mereka alami mulai dari mengajukan gugatan hingga berhadapan langsung dengan aparat dan mengalami berbagai macam intimidasi serta kriminalisasi, yang salah satu contohnya adalah peristiwa “Pakkawa” di mana terjadi bentrok besar antara warga dengan aparat. Di tengah masifnya kriminalisasi yang diterima, pada tahun 2009, masyarakat memutuskan untuk bersatu memperjuangkan hak atas tanahnya dalam menghadapi perusahaan yang dikawal oleh aparat dengan membentuk organisasi Serikat Tani Polongbangkeng (STP).

Hingga saat ini, ketika HGU PTPN XIV telah berakhir, napas perjuangan masyarakat Polongbangkeng tetap hidup dan berkembang meskipun telah melalui berbagai bentuk kriminalisasi seperti penangkapan, penahanan, serta penembakan Mereka terus menuntut keadilan hak atas tanahnya yang telah direbut dengan cara yang tidak demokratis sejak pembebasan lahan.



Darurat Krisis Ekologi: Tolak Lokasi Pembangunan Insinerator (PSEL/PLTSa) PT Sus dan Hentikan Seluruh Proses Izin Pembangunan di Lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia

Ditulis oleh: Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa

Salah satu dalih perintah dalam upaya pengelolaan sampah dilaksanakan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau dikenal dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Hal ini diperkuat melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang secara gamblang memperbanyak titik pembangunan PLTSa di 12 titik, salah satunya di Kota Makassar. Dengan ini, Kota Makassar direncanakan akan dibangun dan dioperasikan PLTSa yang akan dibangun oleh PT Sarana Utama Energy (PT SUS) dengan dalih sebagai solusi andalan pengelolaan sampah.

Secara ideal, pengelolaan sampah sejatinya adalah pelayanan dasar dengan tujuan untuk melindungi kesehatan lingkungan, masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, konsep pelaksanaan PLTSa dapat menggagalkan tujuan dasar pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam praktiknya, PLTSa memiliki risiko tinggi merusak kesehatan publik dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan dalam pengoperasiannya, PLTSa melakukan proses pembakaran yang akan



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

menghasilkan gas dan partikulat yang berbahaya bagi makhluk hidup disekitarnya. Paparan terhadap senyawa berbahaya ini tidak hanya terjadi pada area dekat fasilitas saja, tapi akan tersebar jauh sebagai akibat dari dispersi udara sehingga jumlah orang dan lingkungan terdampaknya akan menjadi sangat besar.

Kekhawatiran ini dirasakan oleh ribuan warga Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, Akasia dan pihak sekolah yang berada di sekitar rencana lokasi PLTSa milik PT.SUS. Warga menilai proyek ini tidak layak dibangun di tengah lingkungan padat penduduk karena berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, pencemaran udara dari emisi insinerator, pencemaran sumber air warga, serta penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Insinerator

bukanlah solusi yang aman dan berkelanjutan untuk mengelola sampah. Teknologi ini membakar sampah pada suhu tinggi dan menghasilkan polutan PM 2,5 serta senyawa berbahaya seperti dioksin dan furan yang sangat bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker, gangguan sistem kekebalan tubuh, kerusakan hormon, gangguan reproduksi, dan berdampak serius terhadap perkembangan anak. Zat-zat ini sangat sulit terurai dan dapat menetap lama di lingkungan maupun tubuh manusia yang dapat mencemari udara, tanah, dan rantai makanan.

Di sisi lain, PLTSa sebagai proyek infrastruktur dengan target masa operasi selama 20-30 tahun juga membebani APBD Kota dengan skema tipping fee dari pemerintah. Operator PLTSa pada umumnya akan meminta jaminan pemerintah untuk pembayaran tipping fee selama masa operasi. Komitmen anggaran yang besar dan lintas masa kepemimpinan ini adalah risiko besar yang mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menganggarkan agenda pemerintah kkota selama masa operasi PLTSa. Untuk biaya operasional, Pemkot akan dimintakan membayar tipping fee kepada operator fasilitas nantinya. Hal ini tentu berdampak kepada keuangan daerah yang seharusnya dapat digunakan dalam mendukung program program pemkot, namun hanya menguntungkan PT. SUS sebagai operator PLTSa.

Selain itu, proyek PLTSa ini dianggap cacat sejak awal dikarenakan prosesnya tidak transparan. Beberapa pertemuan dengan dalih sosialisasi tercatat telah dilakukan oleh pihak PT.SUS namun dalam pertemuannya, tidak menimbulkan kesepakatan antara warga dan PT.SUS. Warga menganggap pertemuan pada saat itu adalah pertemuan ilegal dan tidak transparan karena tidak adanya keterwakilan para pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip konsultasi publik di mana perlu akses publik seluas-luasnya dan melibatkan semua pihak terkait. Dikhawatirkan dengan tidak dilibatkan masyarakat sekitar secara keseluruhan dalam sosialisasi,

maka kemungkinan kegiatan sosialisasi hanya melibatkan segelintir elemen tertentu. Pada kemungkinan kedua, terdapat risiko proses bersifat tokenisme dimana hanya segelintir elemen yang dilibatkan sebagai fungsi simbolis sehingga tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami dari Aliansi Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa (GERAM PLTSa) menyatakan:

- 1 Menolak Keras Pembangunan Pengelolaan sampah menjadi energi listrik pembangkit listrik tenaga sampah (PSEL/PLTSa) di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia.
- 2 Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk meninjau kembali rencana pembangunan PSEL/PLTSa untuk tidak dibangun di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia.
- 3 Mendesak DPRD Kota Makassar untuk mendukung aspirasi warga dalam menolak pembangunan PSEL/PLTSa di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia.



Fakta EKOLOGI!



Dulu Hidup dari Laut, Sekarang Bertahan dari Sisa Harapan: Potret Kehidupan Masyarakat di Pulau Kodingareng yang Terkoyak Akibat Tambang

Ditulis oleh: Archilleus Saile, Muhammad Ilham Septian, dan Verlyn Thesman

Pulau Kodingareng, Makassar. Mentari pagi perlahan menyingkap awan tipis di langit Selat Makassar. Ombak kecil memecah keheningan, namun bukan lagi suara riang nelayan yang terdengar seperti dulu. Kini, banyak perahu terparkir tanpa tujuan.

Selepas shalat Jumat kami berkunjung ke rumah salah satu nelayan, duduk seorang pria paruh baya, duduk diatas kursi panjang menyambut hangat keberadaan kami dan menceritakan laut dengan mata yang pernah berbinar penuh harapan. Ia adalah Pak Abu, nelayan asli Pulau Kodingareng yang pernah merasakan manisnya hidup sebelum pasir laut dikeruk tambang.

"Dulu, sebelum tambang masuk, hidup kami enak sekali. Sehari bisa dapat



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

dua juta. Anak-anak bisa sekolah sampai sarjana. Laut ini sumber kehidupan kami, bersih, tenang, dan penuh ikan,” kenangannya sambil menarik nafas panjang.

Namun, semua berubah ketika kapal tambang pasir laut datang. Laut yang dulu jernih kini keruh. Ombak yang dulu bersahabat, kini mengganas. “Kalau dulu angin kencang air tetap bening. Sekarang? Sedikit angin saja air langsung keruh,” keluhnya.

Tak hanya air yang berubah. Pendapatan nelayan anjlok drastis. Banyak yang berhutang ke rentenir, sebagian memilih pergi ke Labuan Bajo, Banggai, Papua, atau wilayah Timur untuk mencari penghidupan baru. “Saya juga pernah ikut ke luar pulau. Memang penghasilannya bagus, tapi jauh dari keluarga. Akhirnya saya kembali. Biar susah, asal dekat keluarga,” ujar Pak Abu lirik. Keluarga yang ditinggalkan menjadi motivasi utama para nelayan untuk kembali pulang, walaupun keadaan di Kodingareng masih jauh dari kata sejahtera.

Tambang tak hanya mengeruk pasir, tapi juga merampas ruang tangkap nelayan. Lokasi tambang berada di wilayah yang selama ini menjadi tempat

nelayan menggantungkan hidup. Hal ini membuat para nelayan terpaksa untuk pergi mencari nafkah dengan berbagai ancaman yang menanti. *“Kami harus melaut lebih jauh, risiko makin besar. Gelombang tinggi, banyak kapal tenggelam. Keluarga di rumah selalu cemas kalau kami berangkat,”* katanya.

Ketika musim barat datang, air laut naik sampai betis orang dewasa, masuk ke rumah-rumah penduduk. Dampak ekologis tambang kian nyata. *“Dulu kalau angin kencang, kami tidak takut. Sekarang, kami selalu waspada. Laut tidak sama lagi,”* untkapnya.

Pemerintah pernah menjanjikan bantuan, tapi janji itu lebih banyak berupa kata-kata manis. *“Katanya mau kasih mesin perahu, tapi harus diambil di Makassar. Namun, itu hanya janji manis yang diberikan”* keluh Pak Abu, suara kecewa jelas terdengar. Hingga kini, sebagian nelayan hanya bisa bertahan dengan peralatan seadanya.

Beberapa memilih berhenti melaut dan beralih profesi, namun mayoritas tetap menggantungkan hidup pada laut yang kian tak pasti.

Meski kenyataan pahit terus mengiringi, Pak Abu masih memelihara harapan sederhana. *“Saya cuma mau laut ini kembali seperti dulu. Jangan ada lagi tambang dekat pulau. Kami juga butuh bantuan alat tangkap supaya bisa melaut dengan aman,”* katanya

Dampak yang dirasakan pasca adanya tambang laut tidak hanya mempengaruhi para nelayan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain yang ada di Pulau Kodingareng. Aspek ekonomi, sosial, hingga kekeluargaan. Inilah yang dirasakan oleh salah seorang warga yang terdampak secara tidak langsung karena adanya tambang pasir laut. Mama Kenna, seorang istri nelayan ikan tenggiri yang kini sendiri setelah ditinggal pergi oleh suaminya.



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

“Suamiku nelayan, sudah tenggelam kira-kira 1 bulan lalu. Jauh sekali dari sini itu, mati mi. Bayangkan itu jam 11 baru didapat. Jauh memang ikan tenggiri itu dicari.”

Dampak adanya tambang pasir laut di Kepulauan Spermonde yang berlangsung dari 12 Februari – 25 Oktober, hanya delapan bulan tetapi sangat mempengaruhi kehidupan warga yang tinggal di Pulau Kodingareng selama lima tahun. Laut yang dahulu adalah tempat para nelayan menghabiskan waktu untuk mencari ikan, kini menjadi tempat yang menakutkan. Ombak dan angin sangat kencang, ikan-ikan pun sangat jarang dan susah dicari. Penggerusan dasar laut telah menambah kedalaman laut dan juga merusak habitat dari ikan yang ada.

“Dulu banyak sekali ikan, biar (termasuk) ikan tenggiri. Bayangkan ini barang-barang di rumah dicicil, masih lancar sekali ji pemasukan sebelum ada itu tambang (pasir). Masuk itu tambang, jadi semakin susah dapat ikan sekarang. Hal yang ditakutkan saat pergi melaut bapak itu angin dan ombak, sudah 3 kali mi tenggelam bapak. Pernah juga di dekat sini, pernah juga jauh? tenggelamnya.”

“(Kalau) ikan tenggiri dicari, butuh 10 liter bensin ke sana terus belum tentu dapat. Banyak modal keluar. Kalau hilang itu pekan na, la’do na (alat pancingnya) lebih banyak lagi ongkosnya. Dan biasa banyak ditangkap habis tong ji untuk tutup ongkos, jadi tetap ji sedikit (uang) didapat, asal ada,” tambah Mama Kenna.

Kencangnya angin dan ombak juga ikut memperparah keadaan warga yang tinggal di darat, khususnya yang berada di bibir pantai. Terkadang ombak yang datang bisa naik hingga menenggelamkan rumah sehingga beberapa orang terpaksa untuk mengungsi ke tetangga yang tinggal di tengah pulau.

“Lebih kencang dan lebih khawatir saat angin barat biasanya naik air sampai di rumah. Sampai di depan biasa, untung ada ji pelindungnya, sering banjir juga.”

Jadi kalau naik mi air waktu musim barat, takut ma itu, lari ka masuk ke anakku mengungsi, tidak tinggal ka di sini. Rumahnya anakku Windah yang ada rumahnya di lapangan. Lebih menderita pas musim barat, banyak guntur dan kilat. Hasil tangkapannya sama ji, sama ji pendapatannya bedanya musim barat lebih banyak risiko.

Perubahan iklim dan cuaca ini sangat mempengaruhi kehidupan warga. Demi bertahan hidup, para nelayan tetap harus berlayar untuk mencari nafkah, menerjang angin dan ombak yang mungkin bisa merenggut hidup mereka. Sementara itu, wanita dan anak-anak di rumah ketakutan karena tingginya ombak yang menerjang. Mereka hanya bisa berdoa yang terbaik agar suami atau ayah mereka bisa kembali dengan selamat. Tanpa hasil pun tak apa, setidaknya kembali dengan selamat.

Kedadaan yang sangat memprihatinkan ini tentu tidak bisa ditanggung oleh warga dalam waktu yang lama. Risiko kehilangan nyawa di lautan tidak

sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Ombak dan permukaan air laut yang semakin tinggi, angin bertiup kencang membuat pulau semakin lama semakin menipis karena terkikis air laut. Kondisi inilah yang membuat warga Kodingareng ingin meninggalkan pulau dan pergi mencari penghidupan yang lebih aman dan terjamin.

“Banyak orang merantau di sini. Rata-rata orang di sini pergi (merantau),” tutur Mama Kenna.

“Banyak orang pindah nak, banyak sekali. Ini di sebelah sudah lama tidak pulang suaminya dari Labuan Bajo. Tidak ada sekali hasil di sini nak, tidak ada sekali pendapatan,” sambungnya.

Kini Mama Kenna menyambung hidup dengan menjual cao’ (olahan fermentasi ikan). setiap hari ia hanya bisa termenung di teras rumahnya.

Di bibir pulau, perahu-perahu nelayan tampak terombang-ambing. Beberapa rusak, sebagian lagi dibiarkan tanpa layar. Pulau Kodingareng yang dulu riuh oleh suara tawa nelayan kini lebih banyak diselimiti kecemasan. Laut yang dulu sumber kehidupan kini jadi sumber ketidakpastian.

Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan





Sistem Buka Tutup Gurita, Dongkrak Ekonomi dan Lestarkan Laut Spermonde

Ditulis oleh: Archilleus Saile, Muhammad Ilham Septian, dan Verlyn Thesman

Pulau Langkai dan Lanjukang, dua pulau kecil di Kepulauan Spermonde, Kelurahan Barrang Caddi, kini dikenal sebagai contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat tumbuh dari akar masyarakat sendiri. Sejak 2021, sistem buka-tutup gurita mulai diterapkan di sana. Sistem ini tak lahir dari kebijakan atas, melainkan dari gerakan lokal yang diinisiasi melalui Proteksi Gama (Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat).

Program ini hadir dengan membangun kepercayaan, membagi ilmu, dan memperkuat kapasitas warga. Dalam pelaksanaan Proteksi Gama banyak pihak yang terlibat. Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKLI) hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengarah atau pengambil



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

keputusan. Misalnya, jika nelayan tidak paham tentang biologis gurita, maka YKLI akan memfasilitasi kunjungan ahli gurita. Tidak hanya terbatas dalam hal edukasi, YKLI juga memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak-pihak bersangkutan dari pemerintahan, perusahaan, akademisi, media, Non-Governmental Organization (NGO), dan lainnya.

Gerakan Proteksi Gama menjadi pemantik dari diterapkannya sistem buka-tutup gurita di Pulau Lanjukang dan Langkai. Sistem buka-tutup merupakan metode pengelolaan perikanan yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dengan menerapkan pola penutupan wilayah perairan dalam periode tertentu. Penutupan sementara wilayah tangkapan memberi waktu pemulihan bagi ekosistem dan biota laut.

Masyarakat sendiri yang menguji coba dan akhirnya menerapkan sistem buka-tutup wilayah tangkap gurita sebagai hasil nyata dari program ini. Setelah YKLI memfasilitasi nelayan Pulau Lanjukang dan Langkai untuk pergi berkunjung melihat penerapan sistem buka-tutup secara langsung di Pulau Wakatobi, para nelayan kemudian menginisiasi pengadaan sistem ini di Pulau Lanjukang dan Langkai. Nelayan menyaring dan menyesuaikan apa yang telah mereka pelajari dan amati sesuai dengan kondisi pulau, seperti musim penangkapan, lokasi tutup, siklus hidup gurita, dan kearifan lokal.

Gurita sebagai salah satu komoditas utama di pulau menjadi fokus utama sistem buka-tutup. Maka dari itu, dibentuklah Forum Pasibuntuluki, akronim dari Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Gurita Lanjukang dan Langkai. Forum ini memperjuangkan hak atas ruang hidup dan wilayah kelola laut berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola wilayah perairan laut yang telah disepakati bersama masyarakat dengan sistem buka-tutup penangkapan gurita.

Di Pulau Lanjukang dan Langkai sendiri, periode penutupan wilayah tangkap gurita dilakukan selama 3 bulan dan di wilayah lain tetap terbuka. Dilakukan secara bergantian berdasarkan waktu dan lokasi yang telah disepakati. Penentuan lokasi penutupan sementara penangkapan gurita ditetapkan melalui kesepakatan bersama masyarakat yang diketahui para pihak.

Seluruh kegiatan penangkapan dilarang pada area yang ditutup, kecuali nelayan pemancing dengan kapal yang terus bergerak. Pada wilayah penutupan sementara diberi tanda batas berupa pelampung bendera dengan dilengkapi informasi penutupan. Masyarakat khususnya nelayan melakukan pengawasan secara bersama-sama pada lokasi buka-tutup.





Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Fokus utama dari sistem buka-tutup gurita, yaitu melindungi habitat ekosistem—terumbu karang dan spesies-spesies dilindungi yang ada di sekitar wilayah perairan telah tercapai. Walaupun pada awalnya konservasi bukan hal yang mudah untuk diterima masyarakat, diperlukan pendekatan yang bukan hanya berfokus pada konservasi (ekologi). Perlu dipastikan bahwa aspek ekonomi dan ekologi tetap berjalan secara bersamaan dan saling berimbang. Melalui pendekatan di bidang ekonomi, masyarakat mulai dapat memahami penting dan dampak dari konservasi.

Hasil tangkapan gurita nelayan mengalami peningkatan ukuran dan nilai jual setelah diterapkannya sistem buka-tutup. Pendapatan rumah tangga nelayan naik hingga 56,6% berkat pengolahan hasil tangkapan yang lebih

bernilai. Tutupan terumbu karang hidup meningkat 5-10%, sementara praktik destructive fishing berkurang drastis. Sebanyak 5.961 tukik (anak) penyu juga berhasil dilepasliarkan sejak 2022 sebagai bagian dari inisiatif konservasi.

Selain itu, manfaat adanya sistem ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan saja, tetapi dirasakan juga oleh ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu nelayan termotivasi membentuk kelompok usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi produk. Mereka mulai mengembangkan usaha pengolahan hasil laut, meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil tangkapan yang terhitung murah menjadi meningkat nilainya setelah diolah, contohnya gurita dengan grade rendah dijual seharga Rp2.000-Rp5.000/ekor di pasaran kemudian dibuat menjadi olahan sambal yang dapat bernilai lebih.

Masyarakat di Pulau Lankang dan Langkai belum memiliki pengakuan hak kelola wilayah laut yang kuat, terlebih pada lokasi penutupan sementara. Berbeda dengan wilayah darat yang mengenal hak ulayat bagi masyarakat adat, laut belum memiliki sistem hukum yang kuat bagi pengelolaan wilayah laut berbasis masyarakat. Hal ini mengakibatkan sulitnya para nelayan untuk mencegah terjadinya kegiatan penangkapan di wilayah yang ditutup.

Penetapan alokasi luas wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Selatan. Wilayah pencadangan KKD Pulau Lankang seluas 1.654,38 hektare diperuntukkan bagi kawasan konservasi. Namun, hingga saat ini percepatan penetapan KKD Pulau Lankang masih diupayakan.

Proses penetapannya melalui beberapa tahap, tidak langsung ditetapkan sekaligus. Tahap awalnya adalah pengintegrasian Forum Pasibuntuluki ke

dalam Kelompok Kerja (Pokja) Zonasi KKD untuk ikut terlibat dalam penyusunan dokumen KKD. Pelibatan forum ini penting karena anggotanya sendiri adalah nelayan yang telah memiliki pengalaman uji coba sistem buka-tutup di berbagai zona tangkapan, sehingga diharapkan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai zona yang layak ditetapkan sebagai KKD. Dengan begitu, proses penetapannya pun dapat berlangsung lebih cepat.

Tanpa adanya ketentuan yang mengikat, aturan buka-tutup hanya dianggap norma lokal. Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) penting untuk diperjuangkan demi memperkuat legitimasi hak kelola masyarakat secara hukum yang penetapan nantinya ditandatangani oleh menteri, melihat lemahnya pengakuan hak masyarakat di wilayah pesisir. Sebab, tanpa pengakuan hukum atas wilayah tangkap dan hak kelola, masyarakat tidak memiliki dasar pengakuan dan perlindungan dari aktivitas penangkapan ilegal dan destruktif yang seringkali dilakukan oleh nelayan dari luar pulau.

Akibat dari tidak adanya regulasi yang pasti, semua aturan dibuat oleh masyarakat sendiri, termasuk soal sanksi. Dilarang merusak dan/atau mengambil penanda buka-tutup. Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan teguran dan pemahaman terkait maksud dilakukan penutupan. Jika mengulangi perbuatan tersebut, akan diberi sanksi berupa hasil tangkapan disita kemudian disumbangkan untuk kepentingan umum, dan akan dilaporkan pada pihak berwajib. Ancaman lain yang timbul adalah adanya praktik destructive fishing yang masih sering dijumpai. Praktik ini masih sering dilakukan oleh beberapa nelayan lokal pada kasus tertentu malah dilakukan oleh nelayan dari luar pulau.

Selain aspek hukum, tantangan teknis dan sosial masih menghantui. Tidak ada kapal reguler ke pulau, hanya kapal sewaan dengan biaya tinggi. Akses



internet terbatas—hanya tersedia lewat voucher Wi-Fi yang dibeli.

Awalnya, tidak semua warga setuju dengan sistem ini. Namun seiring waktu dan bukti nyata keberhasilan, partisipasi meningkat. Saat ini, sudah ada enam siklus penutupan yang dilakukan. Setelah melalui uji coba di berbagai lokasi, nelayan di Pulau Lanjukang dan Langkai sekarang sudah mampu menentukan lokasi buka-tutup selama satu tahun.

Penerapan sistem buka-tutup gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang diharapkan terus mengalami kemajuan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk senantiasa belajar dan memperkuat penerapannya secara berkelanjutan. Untuk itu, keberlangsungan sistem ini perlu didukung oleh aturan dan regulasi yang tegas agar mampu bertahan dalam jangka panjang, bahkan dapat menjadi inovasi yang diterapkan ke wilayah pesisir lain.

Inisiatif masyarakat pesisir seperti di Lanjukang dan Langkai membuktikan bahwa konservasi dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Namun, tanpa pengakuan legal dan dukungan kebijakan yang nyata, akankah upaya ini mampu bertahan dalam jangka panjang?

Sumber:

<https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/riszky/sistem-buka-tutup-gurita-di-pulau-langkai-dan-lanjukang-menghidupi-nelayan-menghidupkan-ekosistem-laut/>

<https://mongabay.co.id/2023/10/02/patrol-bersama-lindungi-perairan-pulau-langkai-lanjukang-dari-destructive-fishing/>

<https://yklindonesia.org/mendorong-keberlanjutan-sistem-buka-tutup-gurita-di-pulau-lanjukang-dan-pulau-langkai/>

<https://mongabay.co.id/2024/11/22/program-buka-tutup-sukses-tingkatkan-hasil-tangkapan-gurita-di-makassar/>

<https://mongabay.co.id/2025/03/08/saatnya-perkuat-buka-tutup-area-tangkap-gurita-di-makassar/>

<https://pelakita.id/2025/04/23/buka-tutup-gurita-di-pulau-langkai-dan-lanjukang-buka-jalan-pengakuan-hak-kelola-masyarakat-pesisir/>

YKL Indonesia: Forum Pasibuntuluki dilibatkan dalam pokja zonasi KKD - ANTARA News Makassar

<https://mongabay.co.id/2025/04/28/buka-tutup-gurita-di-lanjukang-tingkatkan-ekonomi-nelayan/>

<https://jaringnusa.id/upaya-percepatan-penetapan-kawasan-konservasi-daerah-pulau-lanjukang-ykl-indonesia-gelar-konsultasi-publik/>

Di Hulu, Air Memulai Perjalanannya: Foto Esai Gerakan Konservasi Pemulihan DAS Jeneberang dan DAS Maros

Ditulis oleh: UKM Sintalaras UNM dan LPA HPPMI Maros



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Di pegunungan yang diselimuti kabut pagi, rintik hujan turun dan meresap perlahan ke tanah. Dari akar pohon-pohon besar di hutan, tetes-tetes itu berkumpul menjadi aliran kecil, lalu bersatu menjadi sungai. Begitulah Sungai Jeneberang dan Sungai Maros memulai kisahnya sebuah perjalanan panjang membawa kehidupan dari hulu hingga ke laut.

Namun, kisah itu kini penuh luka. Hulu yang dulu hijau kini mulai gundul. Penebangan liar, tambang, dan alih fungsi lahan merobek resapan air. Sungai kehilangan penyangganya. Setiap musim hujan, air membawa lumpur dan banjir ke pemukiman. Saat kemarau, aliran menyusut, bahkan mengering di beberapa titik. Di hilir, warga harus berjuang mendapatkan air bersih.

Gerakan konservasi dan pemulihan DAS Jeneberang dan DAS Maros adalah jawaban atas ancaman itu. Kami percaya, hulu bukan sekadar titik awal aliran air, tapi sumber kehidupan yang tak ternilai. Karena itu, kami menanam ribuan pohon di kawasan resapan, memulihkan bantaran sungai, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan ini.



Dokumentasi MAPALA SINTALARAS UNM

Di Jeneberang, kami menyusuri jalan setapak menembus hutan, membawa bibit pohon di punggung, menanamnya di tanah yang retak. Di Maros, kami memulihkan mata air, membersihkan aliran, dan mengajak warga bergotong royong menjaga kelestariannya. Semua dilakukan bersama pemerintah, komunitas, perempuan pejuang air bersih, pemuda pencinta alam, dan para akademisi yang mengabdikan pengetahuannya untuk sungai.



Dokumentasi MAPALA SINTALARAS UNM

Setiap pohon yang tumbuh di hulu adalah janji bagi anak cucu, bahwa musim hujan akan membawa air yang jernih, dan musim kemarau tak lagi menjadi ancaman. Setiap tetes air yang mengalir adalah hasil kerja kolektif yang tidak pernah mengenal kata selesai.





Karena memulihkan hulu berarti memberi harapan bagi hilir. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan. Dan menjaga air adalah menjaga masa depan kita bersama.

Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan



CERITA **KAMPUNG**

Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Seratus Banding Sepuluh Persen: Tambang, Tanah, dan Harapan di Loeha Raya

Ditulis oleh: Claudia Aprilia Nuriman dan Sri Suci Aulia Syarif

Di utara Sulawesi Selatan, seberang Danau Towuti, sebuah kawasan yang dulu hanya dikenal sebagai Loeha Raya masih menyimpan denyut kehidupan yang berpaut erat dengan tanah dan hutan. Di sini, berkebun bukan sekadar pekerjaan—ia adalah cara hidup. Di sini, masyarakat Loeha Raya hidup bukan dari tambang atau gedung tinggi, tapi dari tanah yang mereka rawat dengan tangan sendiri. Tanah yang memberi makan, menyekolahkan anak, dan menjaga martabat.

Di tengah derasnyanya investasi tambang yang datang membawa janji pembangunan, masyarakat Loeha Raya justru merasa semakin jauh dari kepastian. Mereka yang menggantungkan hidup dari lada, hasil hutan, dan danau, kini berdiri di ambang kehilangan yang tidak mereka undang: kehilangan tanah, kehilangan ruang, dan pada akhirnya—kehilangan masa depan.



Dokumentasi Claudia Aprilia Nuriman dan Sri Suci Aulia Syarif

Mulyani, atau **Ma' Afif**, menghitung biaya sekolah anaknya dengan cermat: tas Rp250 ribu, seragam Rp150 ribu, belum termasuk sepatu, alat tulis, dan biaya fotokopi. Semua itu ia tanggung dari hasil merica yang ditanam dengan telapak tangan. “Selama masih ada kebun, kami masih bisa atur hidup,” ujarnya. Namun dalam suaranya terselip kekhawatiran, sebab bila kebun itu hilang karena tambang, ia tak punya tempat lain untuk menggantungkan hidup. “Kebun itu satu-satunya.”

Esse, atau yang lebih dikenal sebagai **Ma' Hendra** adalah satu dari banyak perempuan yang hidupnya bergantung pada tanah. Ia tinggal bersama suami dan dua anaknya di sebuah rumah sederhana di Desa Rante Angin. Kesehariannya tidak jauh dari pabrik kelapa yang ada di depan rumahnya, menjual pisang, atau terkadang ikut menyemai merica di kebun keluarga. Pendapatannya tak pernah tetap. Kadang cukup untuk membeli buku,



Dokumentasi Claudia Aprilia Nuriman dan Sri Suci Aulia Syarif

kadang hanya cukup untuk selembar nasi. “Kadang bisa kasih uang jajan sepuluh ribu, kadang tidak ada sama sekali,” ucapnya dengan pelan.

Sebelum ada merica, Esse memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dengan menjual kue. Bahkan untuk sekedar tinggal pun, Esse hanya mampu menumpang di pondok-pondok pemilik kebun sembari membantu menanam dan memetik merica mereka, itu pun Esse dan suami hanya diupah Rp. 500 ribu.

Sedikit demi sedikit uang ia kumpulkan dari hasil jerih payah ia dan suaminya, hingga akhirnya mereka juga mampu memiliki lahan merica sendiri yang hingga sekarang sangat membantu perekonomian mereka.

Baginya, kebun itu adalah dinding terakhir antara keluarganya dan kelaparan. “Kalau tanah hilang, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mungkin pulang kampung.”



Dokumentasi Claudia Aprilia Nuriman dan Sri Suci Aulia Syarif

Cerita lainnya datang dari **Kirana, Ma' Ardi**, yang harus menerima kenyataan bahwa anak sulungnya berhenti sekolah karena terjerumus dalam pergaulan yang buruk. “Susah mengontrol, apalagi kalau anak sudah besar. Di sini tidak ada bimbingan, tidak ada tempat aman untuk belajar,” tuturnya. Ekonomi bukan satu-satunya masalah. Ketimpangan informasi, akses pendidikan, dan ruang tumbuh yang sempit membuat perempuan di desa memikul beban yang semakin berat.

Kirana pun menanggung beban untuk membesarkan ketiga anaknya sendirian sejak suaminya meninggal. Namun, berkat adanya kebun merica, Kirana merasa tak ada tanggungan yang terlalu berat dalam menjalani kesehariannya. Dalam sekali panen, Kirana mampu menghasilkan Rp. 15 juta. Dengan nominal sebesar itu, merica menjadi ‘tulang punggung’ keluarga Kirana, satu-satunya penghasilan yang menopang biaya untuk menjalani hidup esok hari.

Mulyani, atau **Ma' Afif**, menghitung biaya sekolah anaknya dengan cermat: tas Rp250 ribu, seragam Rp150 ribu, belum termasuk sepatu, alat tulis, dan biaya fotokopi. Semua itu ia tanggung dari hasil merica yang ditanam dengan telapak tangan. "Selama masih ada kebun, kami masih bisa atur hidup," ujarnya. Namun dalam suaranya terselip kekhawatiran, sebab bila kebun itu hilang karena tambang, ia tak punya tempat lain untuk menggantungkan hidup. "Kebun itu satu-satunya."

Perempuan-perempuan seperti Ma' Hendra, Ma' Ardi, dan Ma' Afif mungkin tidak berdiri di podium-podium megah. Mereka tidak bersuara di ruang-ruang konferensi. Namun tiap pagi, di antara kabut dan embun, mereka menyiapkan bekal anak-anak mereka, membersihkan halaman rumah, dan menghitung berapa ikat pisang lagi yang harus dijual agar bisa membeli buku pelajaran, sembari menanti naiknya harga merica setiap bulan.

Bagi mereka, tanah bukan sekadar permukaan bumi yang bisa dijual dan dibeli. Ia adalah tempat bertumbuhnya makanan, ilmu, dan kehormatan. Ketika tanah-tanah itu berubah menjadi lubang-lubang tambang, maka yang hilang bukan hanya pohon dan rumput, tapi juga masa depan.

Di Loeha Raya, konflik ini bukan yang pertama. Warga telah lama menyaksikan janji-janji perusahaan tambang yang menggoda: pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, kompensasi tunai. Tapi yang mereka rasakan justru sebaliknya; kehilangan ruang hidup, tekanan psikologis, dan relasi sosial yang terbelah. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terhimpit dalam skema ini. Mereka menghadapi beban

ganda: mengurus rumah dan menyelamatkan tanah.

Padahal, negara seharusnya hadir. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun apa jadinya jika satu-satunya sumber penghidupan digusur, dan anak-anak harus berhenti sekolah karena dapur tak lagi berasap?

Suara-suara perempuan di Loeha Raya mungkin tidak dituliskan dalam laporan-laporan resmi, namun mereka tetap bersuara dengan cara mereka sendiri. Dalam tenang, mereka menolak. Dalam sederhana, mereka bertahan. Mereka tidak ingin menjadi korban atas nama "transisi energi" atau "kemajuan nasional" yang tidak melibatkan mereka.

Tanah bagi mereka adalah pelindung terakhir dari ketidakadilan. Jika tanah itu tetap di tangan rakyat, maka ladang akan terus ditanami, air akan tetap

Suara dari Hilir untuk Harapan di Hulu

Ditulis oleh: Jellian Malisa Evikayati Djonga Tari dan Grisela Jesselyn Halim

Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan



Langit di atas bantaran Sungai Leko Pancing, Kabupaten Maros, membara. Pada Senin, 28 Juli 2025 itu, panas terasa menyalak, seakan sedang merapal mantra pengusir pada khalayak yang berkumpul di sana. Namun, semangat tak serta merta luluh pada cuaca. Di tengah kerumunan yang berpeluh, ada sosok Ibu Nirwana. Guratan wajahnya dipahat karya tangan sang waktu. Ia datang membalut sebuah cerita dari lorong-lorong padat di Kecamatan Tallo, Makassar; sebuah kisah tentang keran yang telah lama membisu dan penantian panjang akan setetes air.

Ia dan para perempuan tangguh lainnya dari **PARAS (Perempuan Pejuang Air Bersih) Tallo** tidak sekadar hadir untuk seremoni. Perjalanan mereka dari hilir ke hulu adalah sebuah ziarah harapan. Selama puluhan tahun, kampung mereka telah akrab dengan kekeringan, sebuah ironi di kota yang dikelilingi lautan. Maka, tatkala mendengar ada gerakan menanam pohon dalam rangka menyambut peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia yang digagas WALHI Sulawesi Selatan untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros, mereka tak berpikir dua kali. Ini adalah panggilan, sebuah kesempatan untuk menjemput harapan langsung dari sumbernya.

"Karena adanya ini kegiatan WALHI, kami juga ingin ikut bersama-sama," tutur Ibu Nirwana. Suaranya terdengar mantap, menjadi perwakilan suara kolektif warga yang mendamba aliran kehidupan kembali lancar.

"Kami bersedia ikut karena ini bukan untuk pribadi kami, tapi untuk masyarakat yang ada di wilayah kami."

Baginya, setiap bibit pohon yang ia genggam hari itu adalah sebuah investasi untuk masa depan. Di tangannya, tunas kecil itu merupakan sebuah semesta baru yang siap dibentuk, seolah memegang janji akan sumber air yang lestari untuk anak cucunya. Antusiasmenya tumpah-ruah, sebuah cerminan betapa mendesaknya persoalan air yang mereka hadapi dari hari ke hari.

"Penting sekali, sangat penting. Kalau saya mau, biar setiap bulannya atau setiap tiga bulan sekali untuk menanam, kami pasti ikut berpartisipasi." Binar matanya berpendar, penuh semangat.

Perjuangan yang Menguatkan

Posisi Kota Makassar yang hadir sebagai muara dari tiga daerah aliran sungai kritis—Jeneberang, Tallo, dan Maros—menempatkannya dalam kerentanan hidrologi yang paradoksal. Kala musim hujan datang bertandang, kota ini harus menanggung beban kiriman air dari wilayah hulu yang tak jarang berujung pada bencana banjir. Sebaliknya, saat kemarau melanda, ketergantungan pada sumber air yang sama justru berbalik menjadi ancaman kekeringan yang mengganggu pasokan air minum krusial yang dikelola PDAM untuk warganya. Kondisi ironis ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian masalah air di Makassar tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan menuntut sebuah kolaborasi lintas batas yang erat dengan pemerintah daerah tetangga seperti Gowa, Maros, dan Takalar untuk mengelola kawasan hulu secara terpadu.

Jalan yang ditempuh untuk memperjuangkan hak atas air bersih itu tidaklah mulus—ia berkelok menantang. Rintangan ibarat badai yang siap menelan apa saja, menguji sabar. Namun, Ibu Nirwana menolak untuk melihatnya sebagai momok. Setiap tantangan adalah guru terbaik yang menempa jiwa.

"Tantangannya luar biasa, tapi senangnya itu kami dapat pengalaman terus," jelasnya seraya mengukir senyum di wajah.

"Tantangan kami ini tidak merugikan, malah menambah wawasan, dan ada perkembangan untuk warga di wilayah kami untuk air bersih."

Perjuangan itu dengan pasti mengubah mereka. Keluh kesah yang dulu hanya bergema di sudut-sudut rumah kini telah menjelma menjadi kekuatan bersama. Mereka belajar, berorganisasi, dan kini, mereka ikut menanam, menjadi bagian dari solusi yang mereka impikan.

Menitip Asa di Tepian Sungai

Alam menyambut mereka dengan hangat ketika satu per satu lubang digali dan bibit pohon mulai ditancapkan ke tanah yang gembur. Ada harapan yang ditanam bersama setiap tunas. Ibu Nirwana menatap teman-temannya, wajah-wajah yang sama-sama membawa asa dari hilir, yang sama-sama tahu bagaimana rasanya mendorong gerobak penopang kehidupan.

"Besar harapan kita semua di sini, mudah-mudahan apa yang kami harapkan terwujud ke depannya."

Sebagai sebuah penutup, ada pesan yang berlabuh kepada warga sekitar selaku tuan rumah aksi hari itu. Sebuah asa agar bibit-bibit harapan yang mereka tinggalkan dapat dirawat dan dijaga bersama, seperti anak sendiri.



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

"Untuk warga di sini, kami mohon jagalah apa yang setelah kami tanam, supaya dia bisa bertumbuh kembang dan membesar untuk semua wilayah, maupun di Maros maupun di Makassar," pungkasnya.

Di setiap akar pohon yang mulai mencengkram tanah Maros, ada doa dan harapan dari warga Tallo yang menanti kembalinya aliran kehidupan. Perjuangan mereka membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah perjuangan untuk kemanusiaan itu sendiri, sebuah jalinan tak terpisahkan antara nasib di hulu dan kehidupan di hilir.

Aktivitas PTPN XIV di Lahan Warga Takalar Sudah Ilegal

Ditulis oleh: Satria

PTPN XIV menguasai ribuan hektare lahan di Takalar sejak puluhan tahun lalu, dengan HGU yang diberikan pemerintah. Selama itu, banyak warga yang kehilangan akses terhadap tanah pertanian mereka. Kini, setelah masa HGU berakhir dan belum diperpanjang secara sah, warga kembali memperjuangkan hak atas tanah tersebut melalui berbagai jalur, baik hukum maupun advokasi lapangan.

Makassar, Sulawesi Selatan Konflik agraria yang melibatkan warga dari tujuh desa di Kabupaten Takalar dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV terus berlanjut. Pada Minggu, 3 Agustus 2025, aktivis perempuan dan pegiat agraria, Musdalifah, menyampaikan berbagai bentuk advokasi yang telah dilakukan dalam mendampingi warga di Posko Perjuangan Petani Takalar.

Menurut Musdalifah, sejak kasus ini mencuat, berbagai upaya non-litigasi (di luar jalur pengadilan) telah dilakukan. Salah satunya adalah melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kasus ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM, dan mereka juga sudah turun langsung meninjau lokasi sengketa, melihat langsung kondisi lahan-lahan yang dipersoalkan,” ujar Musdalifah di posko petani, Minggu (3/08/2025).



Dokumentasi WALHI Sulawesi Selatan

Selain itu, advokasi juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah (Pemda), karena Pemda memiliki peran penting dalam urusan izin dan rekomendasi terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.

“Selama ini kami banyak mendesak Pemda untuk berpihak pada warga. Karena Pemda bisa mengeluarkan rekomendasi penting soal HGU. Kalau Pemda tidak kasih izin perpanjangan, maka perusahaan tak bisa lagi kuasai lahan,” jelasnya.

Musdalifah menambahkan, informasi terakhir yang diterima menunjukkan adanya rencana perpanjangan HGU oleh pihak perusahaan. Karena itu, ia mendesak Pemda untuk tidak lagi memberikan izin perpanjangan tersebut, terutama di lahan-lahan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh warga.

“Harapan kami, paling tidak tanah warga di tujuh desa yang sedang berjuang ini bisa dikeluarkan dari wilayah HGU. Jangan sampai semua tanah itu diklaim terus oleh perusahaan,” tutup Musdalifah.

Di waktu yang sama, seorang aktivis agraria bernama “Hasbi” menyampaikan bahwa status hukum lahan yang disengketakan saat ini tidak lagi sah untuk dikuasai oleh pihak perusahaan.

Pernyataan ini disampaikan Hasbi saat berdiskusi bersama petani di Posko Perjuangan Petani Takalar, salah satu titik konsolidasi warga yang menolak klaim sepihak dari perusahaan. Ia menyebut bahwa “Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN XIV telah resmi berakhir pada 9 Juli 2024.

“Saya melihat dari sisi hukum, HGU PTPN sudah habis sejak 9 Juli 2024. Artinya, secara hukum, perusahaan tidak lagi punya hak atas lahan ini. Tapi mereka masih melakukan aktivitas di atas tanah ini, dan itu jelas aktivitas ilegal,” kata Hasbi, Minggu (3/08/2025).

Hasbi juga menegaskan bahwa seharusnya, bila PTPN XIV merupakan perusahaan yang taat hukum, mereka semestinya sudah menghentikan seluruh operasional di atas lahan tersebut sejak masa HGU berakhir. Ia mempertanyakan kenapa pihak perusahaan tidak memanfaatkan lahan itu secara aktif sebelum masa HGU habis.

“Kalau memang serius bertani, kenapa sebelum HGU berakhir mereka tidak olah lahan? Ini yang jadi masalah. Sekarang mereka memaksa terus beroperasi padahal izinnya sudah tidak berlaku,” tambahna.



Dokumentasi KabarMakassar.com

Menurut Hasbi, para warga yang sejak dulu bermukim dan bertani di wilayah tersebut memiliki hak penuh untuk kembali menguasai lahannya. Ia mendesak agar negara tidak membiarkan PTPN XIV terus melakukan aktivitas yang dianggapnya melanggar hukum.

INFO

Pulihkansulsel

WALHI SULSEL

BACA SELINGKAPNYA DI WEBSITE
WALHI SULAWESI SELATAN

SCAN OR BARCODE



<https://bit.ly/walhisulsel>

INSINERATOR BUKAN SOLUSI: WALHI SULSEL DESAK PEMKOT MAKASSAR FOKUS PERKUAT TPS3R DAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI HULU

Makassar, 15 April 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mengancam rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan membangun insinerator sebagai solusi krisis sampah kota. WALHI menilai kebijakan ini sebagai langkah yang keliru dan berisiko merusak sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Fadli, Kepala Divisi Transisi Energi dan Pangan WALHI Sulsel, menyebut pendekatan pemusnahan sampah berbasis pembakaran mengabaikan akar persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. "Rencana membangun insinerator ini tidak hanya salah arah dan menunjukkan kemalasan Pemkot dalam mengurus akar masalah sampah, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Insinerator bukan solusi, melainkan masalah tambahan," tegas Fadli dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

WALHI SULSEL BERSAMA JARINGAN DOSEN SEPAKAT MEMBENTUK 'FORUM AKADEMIKI UNTUK KEADILAN AIR' DI KOTA MAKASSAR

Permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih yang dialami masyarakat yang tinggal di utara Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo tidak hanya menjadi perhatian oleh Pemerintah dan CSO, melainkan juga akademisi. Oleh karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan pada Hari Rabu (2 Juli 2025) mengadakan Konsolidasi Akademisi se Kota Makassar dengan tema 'Kolaborasi Akademisi se Kota Makassar Wujudkan Ketahanan Air Bersih di Tengah Ancaman Krisis Iklim bagi Masyarakat Miskin Kota' di Nol Tiga Coffee. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan mengundang serta melibatkan beberapa dosen dari beragam perguruan tinggi yang konsen pada isu perubahan iklim, krisis air, dan ekologi perkotaan. Adapun dosen yang sempat hadir dalam kegiatan ini yakni Rita Tahir Lopa, Kepala Pusat Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS, Hikmahwati Sabar, Dosen Sosiologi UIN Alauddin Makassar, Sudirman Nasir, Dosen FKM UNHAS, Muh Asy'ari, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UNIBOS, Hamdam, Dosen Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar, Babra Kamal, Dosen Ilmu Politik UTS Makassar, dan Nur Hidayah Dosen Akuntansi Lingkungan Unsulbar.

RATUSAN WARGA PROTES LOKASI PLTSA DI TAMALANREA, WALHI SULSEL INGATKAN BAHAYA KESEHATAN

Makassar – Gelombang penolakan terhadap pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui skema Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) terus bergulir di Tamalanrea. Pada Selasa (29/7), ratusan warga dari wilayah Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia membentangkan spanduk dan poster protes di Gerbang Eterno, menolak rencana pembangunan PLTSA yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman.

Aksi ini diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan tokoh masyarakat, yang menyuarakan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kesehatan jangka panjang jika proyek tetap dilanjutkan. Mereka juga menyoroti kurangnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam. Siti Husnawati Malik, atau Ibu Coa', salah satu warga yang rumahnya berdamangan langsung dengan lokasi proyek, mengaku resah. "Bukan menolak pembangunannya, tapi tempatnya tolong ditinjau kembali. Di sini banyak anak-anak, dan wilayah ini juga rawan banjir. Kasihan kalau nanti limbah atau asapnya masuk ke rumah kami," ujarnya.

KHAWATIR DAMPAK LINGKUNGAN DAN KESEHATAN YANG AKAN DIRASAKAN, WARGA KOTA MAKASSAR TOLAK KEHADIRAN PLTSA

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kecamatan Tamalanrea terus menuai penolakan dari warga. Sejumlah perwakilan masyarakat sekitar lokasi perencanaan proyek menyampaikan keberatan mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kota Makassar (Rabu, 6/8/2025). Sebelum melakukan RDP, puluhan warga menyuarakan penolakan mereka melalui aksi pembentangan spanduk dan tuntutan dengan harapan agar DPRD Kota Makassar khususnya Wali Kota Makassar mendengar langsung keinginan serta harapan warga.



WALHI
SULAWESI SELATAN

FAKTA
EKOLOGI